

Tinjauan yuridis atas persetujuan majelis pengawas daerah notaris dalam pemanggilan notaris oleh penyidik penuntut umum atau hakim berkaitan dengan akta pejabat pembuat akta tanah study kasus putusan MPDN Kota Manado no 01 mpdn mdo ii 2012 = Juridical review on the approval of dsc of notary in the summon of notary by the investigators prosecutors or judges relating to the deed of the ldo case study on the decision of the dsc of notary of Manado City nr 01 mpdn mdo ii 2012

Maramis, Muriel Cattleya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365059&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas cakupan Pasal 66 ayat (1) b UUJN 2004 sehubungan dengan PPAT dan dasar pertimbangan MPD untuk memberikan/tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

Hasil penelitian menyarankan agar dalam UUJN dimasukkan ketentuan bahwa pemanggilan Notaris mencakup juga Notaris selaku PPAT dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM perlu diatur lebih lanjut bahwa dasar pertimbangan MPD adalah dengan menempatkan Akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yaitu dilakukan pemeriksaan apakah akta Notaris yang bersangkutan melanggar ketentuan pembuatan akta otentik atau tidak.

.....This thesis discusses the scope of Article 66 paragraph (1) b of Notary Act in connection with the LDO (Land Deed Officer) and the consideration of DSC (District Supervisory Council) to give / do not give consent for the summon of Notary. This study is a descriptive qualitative research design.

The results of the study suggest that in Notary Act included provisions that call also includes Notary as LDO and in the Regulation of Minister of Justice should be further arranged that the basic consideration of DSC is to place Notary Deed as the object of examination.